

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini, merupakan penyesuaian Indikator Rencana Kerja. Guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Boroko, Juli 2024



dr. Jusnan C. Mokoginta, M.A.R.S
Pembina Utama Muda
Nip. 19671105 200012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD TW II Tahun 2024 ..	5
2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ..	15
2.3. Penelaahan perubahan usulan program / kegiatan Sekretariat Daerah	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. Tujuan dan Sasaran	19
3.2. Perubahan Program dan Kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode triwulan III dan IV yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat :

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan Program Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2024.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai pada triwulan II.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja perubahan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja perubahan harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun untuk dapat mempertajam tujuan dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang terkait dengan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
- g. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
- h. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 67).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka mengevaluasi program kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan pada awal tahun sampai dengan triwulan II serta mempertajam pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan dimasing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi sampai pada pertanggung jawaban hasil pelaksanaan.

- c. Tercapainya penggunaan sumber daya dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.3 Penelaahan perubahan usulan program/kegiatan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, agar penyusunan Renja sekaligus pelaksanaannya di tahun mendatang dapat lebih maksimal dan lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah kembali dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renja tahun sebelumnya dengan tujuan untuk lebih mempertajam dalam pengalokasian anggaran pada setiap program kegiatan dan mendorong tercapainya tujuan maupun sasaran yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5 = (4/3)
SKPD: SEKRETARIAT DAERAH		RATA-RATA KINERJA : 57,43%			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100 %		38%
		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	100 %		
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 %	100	38%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	8 Dokumen	6	39%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2 Dokumen	1	36%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	1	38%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase rancangan produk hukum daerah	100 %	100	35%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	900 Dokumen	238	26%
Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	0	0%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	300 Dokumen	238	79%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase Dokumen hasil Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah	100 %		60%
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	5	83%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	1	14%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	5	83%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Bentuk Kerja sama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah	100 %	100	20%
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	10 Laporan	0	0%
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	1 Dokumen	0	0%
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	10 Dokumen	6	60%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi kegiatan perekonomian dan Pembangunan	100 %	100	28%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang dilaksanakan	100 %		20%
Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	4 Laporan	2	50%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	1	25%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	1	25%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	0	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah BLUD aktif yang dibentuk	1 Dokumen	0	0%
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam	100 %	100	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan Perindustrian KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	0	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Dokumen	0	0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4 Dokumen	0	0%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pembangunan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100	50%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 dokumen	2	50%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 laporan	2	50%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	2	50%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100 %	100	43%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	122 Dokumen	83	68%
Pengelolaan, Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Dokumen	19%	19%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang	5	42%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100 %	100	63%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100	0%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	36 Dokumen	0	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	78%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1600 Orang/Bulan	900	56%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 Dokumen	100	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	33%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	300 Paket	300	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	0	0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	0	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	97%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1	100%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 Paket	9	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	5	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	8	80%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100	50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	28 Orang/Bulan	0	0%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang	2	100%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	204 Orang/Bulan	102	50%
Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumah tanggan sekretariat daerah	100 %	100	67%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	10 Paket	10	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	10 Paket	0	0%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	2 Paket	2	100%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	40%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	15 Unit	-	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	-	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	12	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 Unit	0	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	6	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100	83%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	15	100%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	25	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 Unit	1	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	0	0%
Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi perangkat daerah	100 %		75%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	10 Dokumen	5	50%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	35 Laporan	35	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	36 Dokumen	18	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	36 Dokumen	36	100%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 %	100	89%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	300 Laporan	300	100%
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi keprotokolan	300 Laporan	260	87%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300 Laporan	237	79%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100 %	100	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	7 Paket	7	100%

Arah kebijakan pemerintah daerah menunjukkan target akhir sebesar 100% untuk indikator strategis, dengan capaian s.d. 2024 pada level program utama sudah mendekati 90%. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki tujuan yang ambisius untuk mencapai kinerja yang optimal. Namun, perlu diingat bahwa capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Secara umum, serapan anggaran di TW II 2024 sudah mulai berjalan pada beberapa program dan subkegiatan, namun belum merata. Pola ini wajar di awal tahun ketika proses pengadaan dan persiapan pelaksanaan masih dominan, tetapi perlu akselerasi di TW III agar tidak menumpuk di akhir tahun. Kegiatan bersifat layanan dasar dan administrasi tata pemerintahan umumnya menunjukkan realisasi yang relatif lebih tinggi di awal tahun karena paket belanja operasional dan kontraktualnya jelas dan berulang. Ini menandakan perencanaan kas dan penjadwalan kegiatan yang baik, terutama pada unit yang memiliki siklus operasional stabil.

Pada tahun 2024, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dari sisi penyerapan anggaran, namun pelaporan kinerja fisik (output/indikator) masih perlu dilengkapi pada beberapa kegiatan/subkegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam memantau dan melaporkan kinerja fisik secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pelaporan kinerja fisik untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan distribusi target fisik secara merata pada TW III untuk memastikan capaian tidak menumpuk di akhir tahun. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Dengan melakukan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditetapkan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efektif dan efisien.

2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada Pelayanan, program kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Sebagai berikut :

a. Pelayanan

- Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan public pada SKPD
- Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kualitas produk hukum
- Peraturan Daerah yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta belum tersosialisasi ke seluruh lapisan Masyarakat
- Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
- Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan social masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

b. Program Kegiatan

- Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat Perangkat Daerah
- Tidak adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal tertentu, sehingga dapat berdampak pada sulitnya ditemukan solusi hukum yang tepat
- Tingkat koordinasi aparatur kewilayahaan masih rendah
- Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah desa / kelurahan / kecamatan / kabupaten
- Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah
- Pemahaman SKPD terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih rendah
- Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
- Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
- Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan
- Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah belum memadai

c. Teknis Operasional

- Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya
- Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah
- Kurangnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya kreativitas dan inovasi. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur
- Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
- Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah belum optimal
- Perlunya system pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
- Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang komunikasi dan informasi
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi
- Minimnya apresiasi dan partisipasi Masyarakat dalam penyebarluasan informasi yang membangun

2.3. Penelaahan perubahan usulan program / kegiatan Sekretariat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu dilakukan telaah perubahan usulan program/kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Pelayanan

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pelayanan, dan peningkatan infrastruktur pendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan, dan meningkatkan kualitas output pelayanan.
- Peningkatan Capaian Kinerja: Perlu dilakukan peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pengembangan indikator kinerja, dan peningkatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola kinerja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja.
- Pengembangan Produk Hukum: Perlu dilakukan pengembangan produk hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan sosialisasi produk hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun produk hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum, dan meningkatkan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.

b. Program Kegiatan

- Perencanaan Strategis: Perlu dilakukan peningkatan perencanaan strategis tingkat Perangkat Daerah melalui pengembangan rencana strategis yang lebih efektif dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam proses perencanaan, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi rencana strategis.
- Regulasi dan Produk Hukum: Perlu dilakukan pengembangan regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal tertentu untuk meningkatkan kepastian hukum dan solusi hukum yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun regulasi dan produk hukum, meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi dan produk hukum, dan meningkatkan sosialisasi regulasi dan produk hukum kepada masyarakat.

- Koordinasi Aparatur Kewilayahan: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi aparatur kewilayahan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparatur kewilayahan dalam berkoordinasi, meningkatkan komunikasi antar aparatur kewilayahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi.

c. Teknis Operasional

- Dokumen Perencanaan: Perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan.
- Koordinasi Pihak Terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam berkoordinasi, meningkatkan komunikasi antar pihak terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola SDM, meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM, dan meningkatkan motivasi dan kinerja SDM.

Dengan melakukan telaah perubahan usulan program/kegiatan berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dipilih dengan mengacu pada upaya pencapaian visi-misi-tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan akan berdampak keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024 Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024			
			INDUK		PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100	Persen	100	Persen
		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	100	Persen	100	Persen
		Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	Persen	100	Persen
4.1.2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100	Persen	100	Persen
4.1.2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	3	Dokumen	3	Dokumen
4.1.2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2	Dokumen	2	Dokumen
4.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen
4.1.2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah	100	Persen	100	Persen
4.1.2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	300	Dokumen	300	Dokumen
4.1.2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Kasus	1	Kasus

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024			
			INDUK		PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
4.1.2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	300	Dokumen	300	Dokumen
4.1.2.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen hasil Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen
4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	3	Dokumen
4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asministrasi Kewilayahan	2	Dokumen	2	Dokumen
4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen
4.1.2.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Bentuk Kerja sama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah	100	Persen	100	Persen
4.1.2.2.04.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	10	Laporan	10	Laporan
4.1.2.2.04.2	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen	1	Dokumen
4.1.2.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	11	Dokumen	11	Dokumen
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Program Pembangunan Daerah yang Dilaporkan	100	Persen	100	Persen
		Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ	Pro Aktif		Pro Aktif	
4.1.3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang dilaksanakan	100	Persen	100	Persen

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024			
			INDUK		PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
4.1.3.2. 01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2. 01.2	Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	4	Laporan	4	Laporan
4.1.3.2. 01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2. 01.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dokumen	1	Dokumen
4.1.3.2. 01.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dokumen	1	Dokumen
4.1.3.2. 04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam	100	Persen	100	Persen
4.1.3.2. 04.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan Perindustrian KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2. 04.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2. 04.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2. 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pembangunan yang dilaksanakan tepat waktu	100	Persen	100	Persen
4.1.3.2. 02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Laporan	4	Laporan

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024			
			INDUK		PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
4.1.3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100	Persen	100	Persen
4.1.3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	Dokumen	150	Dokumen
4.1.3.2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	4	Dokumen	4	Dokumen
4.1.3.2.03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	Orang	10	Orang
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Agenda Resmi yang Difasilitasi Dalam Setahun	100	Persen	100	Persen
		Persentase OPD yang Menyampaikan LKjIP Tepat Waktu	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.02	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.02.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	36	Dokumen	36	Dokumen
0.0.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1600	Orang/ Bulan	1600	Orang/ Bulan

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024	
			INDUK	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.0.1.2. 02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen
0.0.1.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	300 Paket	300 Paket
0.0.1.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	2 Orang
0.0.1.2. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	35 Orang
0.0.1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
0.0.1.2. 06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	9 Paket	9 Paket
0.0.1.2. 06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	5 Paket	5 Paket
0.0.1.2. 06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	4 Paket	4 Paket
0.0.1.2. 06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang Difasilitasi	10 Laporan	10 Laporan
0.0.1.2. 06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	6 Laporan	6 Laporan

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024			
			INDUK		PERUBAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
0.0.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang/Bulan	28	Orang/Bulan
0.0.1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	7	Paket	7	Paket
0.0.1.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	2	Orang
0.0.1.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	204	Orang/Bulan	204	Orang/Bulan
1.02.12	Fasilitasi Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10	Paket	10	Paket
0.0.1.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10	Paket	10	Paket
0.0.1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2	Paket	2	Paket
0.0.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah	100	Persen	100	Persen
0.0.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	15	Unit	15	Unit
0.0.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan	3	Unit	3	Unit

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024	
			INDUK	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.0.1.2. 07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	12 Unit	12 Unit
0.0.1.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	1 Unit	1 Unit
0.0.1.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	7 Unit	7 Unit
0.0.1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
0.0.1.2. 08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
0.0.1.2. 08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
0.0.1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit
0.0.1.2. 09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	15 Unit
0.0.1.2. 09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	25 Unit
0.0.1.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024	
			INDUK	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.0.1.2. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
0.0.1.2. 09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
0.0.1.2. 13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen
0.0.1.2. 13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Perangkat Daerah Yang difasilitasi	35 Laporan	35 Laporan
0.0.1.2. 13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Impelementasi Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen
1.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Implementasi SAKIP	36 Dokumen	36 Dokumen
0.0.1.2. 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen
0.0.1.2. 14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	300 Laporan
0.0.1.2. 14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	300 Laporan	300 Laporan
0.0.1.2. 14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300 Laporan	300 Laporan

3.2. Perubahan Program dan Kegiatan

Perubahan usulan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN		
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAH AN	SELISIH			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100	Persen	100	Persen	6.267.384.550	6.155.267.580	-112.116.970	
		Persentase Penetapan dan pengesahan peraturan dan penyelesaian perkara	100	Persen	100	Persen				
		Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	Persen	100	Persen				
4.1.2.2 .02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100	Persen	100	Persen	4.537.973.400	4.410.951.400	-127.022.000	
4.1.2.2 .02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	3	Dokumen	3	Dokumen	1.189.075.100	1.051.194.300	-137.880.800	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
4.1.2.2 .02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2	Dokumen	2	Dokumen	2.524.322.600	2.561.588.900	37.266.300	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.2.2 .02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	824.575.700	798.168.200	-26.407.500	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
4.1.2.2 .03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah	100	Persen	100	Persen	308.585.800	308.585.800	0	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024				TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK		PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.2.2 .03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	300	Dokumen	300	Dokumen	193.426.200	193.426.200	0	
4.1.2.2 .03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	Kasus	1	Kasus	71.999.800	71.999.800	0	
4.1.2.2 .03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	300	Dokumen	300	Dokumen	43.159.800	43.159.800	0	
4.1.2.2 .01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen hasil Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	565.121.350	580.026.380	1 0 0	
4.1.2.2 .01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	3	Dokumen	351.916.950	366.821.980	14.905.030	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.2.2 .01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asministrasi Kewilayahan	2	Dokumen	2	Dokumen	18.854.350	18.854.350	0	
4.1.2.2 .01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	194.350.050	194.350.050	0	
4.1.2.2 .04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Bentuk Kerja sama antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah	100	Persen	100	Persen	855.704.000	855.704.000	0	
4.1.2.2 .04.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	10	Laporan	10	Laporan	855.704.000	855.704.000	0	
4.1.2.2 .04.2	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	
4.1.2.2 .04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	11	Dokumen	11	Dokumen	0	0	0	
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Program Pembangunan Daerah yang Dilaporkan	100	Persen	100	Persen				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ	Pro Aktif	Pro Aktif				
4.1.3.2 .01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	33.512.600	71.069.960	37.557.360	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.3.2 .01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	6.622.800	6.622.800	0	
4.1.3.2 .01.2	Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perkonomian	4 Laporan	4 Laporan	9.331.400	28.110.080	18.778.680	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.3.2 .01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	4.912.800	4.912.800	0	
4.1.3.2 .01.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.022.800	24.801.480	18.778.680	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.3.2 .01.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.622.800	6.622.800	0	
4.1.3.2 .04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam	100 Persen	100 Persen	23.925.000	23.925.000	0	
4.1.3.2 .04.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan Perindustrian KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	7.975.000	7.975.000	0	
4.1.3.2 .04.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Dokumen	4 Dokumen	7.975.000	7.975.000	0	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.3.2 .04.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.975.000	7.975.000	0	
4.1.3.2 .02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pembangunan yang dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	61.313.600	64.683.600	3.370.000	
4.1.3.2 .02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	23.083.800	23.083.800	0	
4.1.3.2 .02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.029.800	20.029.800	0	
4.1.3.2 .02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	18.200.000	21.570.000	3.370.000	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.3.2 .03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa tepat waktu	100 Persen	100 Persen	318.584.700	318.629.880	45.180	
4.1.3.2 .03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen	61.229.300	61.274.480	45.180	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
4.1.3.2 .03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	247.340.800	247.340.800	0	
4.1.3.2 .03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	10 Orang	10.014.600	10.014.600	0	
0.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Agenda Resmi yang Difasilitasi Dalam Setahun	100 Persen	100 Persen				
		Persentase OPD yang Menyampaikan LKjIP Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen				
0.0.1.2 .02	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan penganggaran	100 Persen	100 Persen	0	0	100	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
0.0.1.2 .02.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	0	0	1 0 0	
0.0.1.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.054.369.010	10.054.369.010	0	
0.0.1.2 .02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1600 Orang/Bulan	1600 Orang/Bulan	10.054.369.010	10.054.369.010	0	
0.0.1.2 .02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	
0.0.1.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	156.650.000	136.050.000	-20.600.000	
0.0.1.2 .05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	300 Paket	300 Paket	153.150.000	136.050.000	-17100000	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	2 Orang	0	0	0	
0.0.1.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	3.500.000	0	-3.500.000	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.232.612.934	3.649.480.247	416.867.313	
0.0.1.2 .06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	27.992.500	27.992.500	0	
0.0.1.2 .06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	9 Paket	9 Paket	509.662.897	475.456.990	-34.205.907	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.0.1.2 .06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	5 Paket	5 Paket	275.241.037	275.241.037	0	
0.0.1.2 .06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah/Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	4 Paket	4 Paket	43.578.600	40.253.200	-3.325.400	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang Difasilitasi	10 Laporan	10 Laporan	22.495.000	21.257.500	-1.237.500	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	6 Laporan	6 Laporan	2.353.642.900	2.809.279.020	455.636.120	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	956.000.000	956.000.000	0	
0.0.1.2 .11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	0	0	0	
0.0.1.2 .11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	7 Paket	7 Paket	0	0	0	
0.0.1.2 .11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	54.000.000	54.000.000	0	
0.0.1.2 .11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	204 Orang/ Bulan	204 Orang/ Bulan	902.000.000	902.000.000	0	
1.02.1 2	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.843.824.733	1.983.841.893	140.017.160	
0.0.1.2 .12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10 Paket	10 Paket	1.187.388.716	1.327.405.876	140.017.160	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10 Paket	10 Paket	0	0	0	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.0.1.2 .12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2 Paket	2 Paket	656.436.017	656.436.017	0	
0.0.1.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	2.342.935.500	2.492.275.500	149.340.000	
0.0.1.2 .07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	15 Unit	15 Unit	0	0	0	
0.0.1.2 .07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan	3 Unit	3 Unit	0	0	0	
0.0.1.2 .07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	12 Unit	12 Unit	346.121.500	442.961.500	96.840.000	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1996814000	2.049.314.000	52.500.000	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	7 Unit	7 Unit	0	0	0	
0.0.1.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.896.533.423	5.359.571.583	-536.961.840	
0.0.1.2 .08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	440.861.373	367.511.373	-73.350.000	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.600.950.000	1.280.472.000	-320.478.000	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.854.722.050	3.711.588.210	-143.133.840	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.497.297.970	3.376.983.990	-120.313.980	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024		TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.0.1.2 .09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	1.201.230.330	1.202.850.330	1.620.000	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	15 Unit	800.940.000	800.940.000	0	
0.0.1.2 .09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	22.250.000	22.250.000	0	
0.0.1.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.398.407.640	1.276.473.660	-121.933.980	Dialihkan ke sub kegiatan yang lain
0.0.1.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	74.470.000	74.470.000	0	
0.0.1.2 .09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0	0	
0.0.1.2 .13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	82.735.000	82.735.000	0	
0.0.1.2 .13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan Perangkat Daerah Yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	13.162.600	13.162.600	0	
0.0.1.2 .13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Perangkat Daerah Yang difasilitasi	35 Laporan	35 Laporan	13.162.600	13.162.600	0	
0.0.1.2 .13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Impelementasi Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	13.162.600	13.162.600	0	
1.2.13. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Implementasi SAKIP	36 Dokumen	36 Dokumen	43.247.200	43.247.200	0	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2024				TARGET ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (Rp0)			ALASAN PERUBAHAN
			INDUK		PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	SELISIH	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
0.0.1.2 .14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100	Persen	100	Persen	1.206.973.500	1.249.769.277	42.795.777	
0.0.1.2 .14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan	300	Laporan	300	Laporan	119.079.000	161.874.777	42.795.777	Untuk menunjang pelaksanaan sub kegiatan
0.0.1.2 .14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	300	Laporan	300	Laporan	867.941.000	867.941.000	0	
0.0.1.2 .14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300	Laporan	300	Laporan	219.953.500	219.953.500	0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini disusun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan yang baik dan terarah. Renja ini mencakup evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, dan telaah perubahan usulan program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah Ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah Transparansi; Pelaksanaan Renja harus transparan dan akuntabel. Efisiensi; Pelaksanaan Renja harus efisien dan efektif.

Rencana tindak lanjut Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian program dan kegiatandan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Demikian, semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Boroko, Juli 2024



dr. Jusnan C. Mokoginta, M.A.R.S
Pembina Utama Muda
Nip. 19671105 200012 1 003